

Polda Awasi Penyerapan Anggaran

Tidak Kedepankan Penindakan Hukum

MUGASSARI - Polda Jateng siap melakukan pengusutan jika terindikasi terjadi penyelewengan anggaran. Namun demikian, hal itu dilakukan setelah dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bila diketahui adanya indikasi penyelewengan anggaran.

Hal itu berkaitan dengan upaya optimalisasi penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah. Sepanjang dilakukan dengan benar, kepolisian tidak akan mengedepankan penindakan terhadap pengawasan penyerapan anggaran 2015.

"Kami memberi kebebasan terhadap upaya penyerapan anggaran, asal dilakukan sesuai prosedur yang benar. Misalnya nanti diketahui ada penyimpangan, kami serahkan ke BPK untuk menentukannya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Edhy Mustofa, Jumat (18/9).

Dikatakannya, sesuai dengan instruksi presiden, tidak ada penindakan secara hukum berkaitan dengan proses penyerapan anggaran 2015.

Kepolisian juga akan turut

mendorong agar hal tersebut dapat berjalan secara optimal. Namun demikian, jika terbukti adanya indikasi penyelewengan, pihaknya akan menjalankan hukum sebagaimana berlaku. "Hal-hal yang menghambat akan disikat," tegasnya.

Dia mencontohkan, dalam proyek pembangunan jalan tol misalnya. Apabila diketahui ada indikasi penyelewengan, pihaknya berharap semua pihak bisa memantau dan melakukan pengawasan.

"Kalau memang ada hal yang menghambat, silakan disampaikan. Nanti penghambat itu akan disikat," katanya.

Ia berharap, anggaran bisa terserap secara optimal. Jangan sampai kemudian mengakibatkan kerugian negara, dan kerugian ekonomi.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Hartadi, juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Jateng untuk mengawal optimalisasi penyerapan anggaran. "Saya mengimbau kepada seluruh satuan kerja untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran guna menjaga stabilitas perekonomian," pintanya. (amu/aro)